

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Audit Internal PT PLN telah memadai.
 - a. Auditor dibebaskan dari tanggung jawab operasional untuk mendukung terwujudnya sikap independensi dan objektivitas tersebut. Auditor mempertanggungjawabkan hasil auditnya kepada *General Manager*.
 - b. Auditor internal pada PT PLN Persero mempunyai pengetahuan, keahlian, dan disiplin yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab audit terkait dengan standar kompetensi tersebut.
 - c. PT PLN memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang pekerjaan audit. Setiap auditor diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh PT PLN. Salah satunya yaitu manajemen sertifikasi QIA.
 - d. Auditor internal PT PLN selalu menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal. Hal-hal yang diuji adalah sebagai berikut.
 1. Tertib administrasi pengurusan uang, barang/material sarana kerja.
 2. Ketaatan terhadap kebijakan, rencana, peraturan, dan perundang-

- undangan yang berlaku.
3. Penggunaan sumber daya perusahaan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.
 4. Keamanan asset perusahaan.
 5. Pencapaian tujuan, sasaran program dan kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
- e. Langkah-langkah dalam audit lapangan PT PLN terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit (pertemuan pembuka, pengumpulan dokumen, pelaporan, pertemuan penutup), dan tindak lanjut. Pelaksanaan penugasan audit mengikuti langkah-langkah tersebut.
- f. Penilaian kinerja dalam penugasan audit yang dilakukan dengan menilai secara berjenjang, yaitu Ketua Tim menilai setiap anggotanya selama melakukan tugas audit, dan koordinator tim menilai para ketua tim, guna mendorong peningkatan kualitas hasil pemeriksaan secara profesional.
2. Pengelolaan Kas PT PLN telah efektif dilakukan.
- a. Staf Keuangan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik. Bidang keuangan PT PLN terbagi dalam empat fungsi, yaitu fungsi pengelolaan biaya, fungsi pengelolaan pendapatan, fungsi akuntansi, dan fungsi pengelolaan anggaran.
 - b. Untuk setiap transaksi, harus disertai dengan kuitansi kas. Penerimaan kas harus mendapat persetujuan dari Deputi Manajer Pengelolaan

Pendapatan dalam menerbitkan bukti penerimaan kas. Sama halnya dengan penerimaan kas, pengeluaran kas juga memiliki dokumen, yang disebut dengan bukti pengeluaran kas.

- c. PT PLN menggunakan formulir permintaan pengeluaran kas yang ditujukan untuk bagian pengendalian anggaran.
- d. Seluruh pendapatan yang diterima pada hari itu langsung disetorkan dan saldonya selalu diperiksa oleh Supervisor Pengendalian Keuangan.
- e. Audit internal pada bagian keuangan ini dilakukan setahun sekali, atau apabila terjadi keanehan dalam hal keuangan. Periode audit ditentukan oleh bagian audit internal dengan mencocokkan jadwal bagian keuangan.
- f. Rekonsiliasi PT PLN atas saldo bank dan pembukuan bank PLN dilakukan setiap bulannya, per akhir bulan. Rekonsiliasi dibuat oleh Supervisor Pengendalian Keuangan dan dengan sepengetahuan Deputi Manajer Pengelolaan Biaya.

3. Kelemahan

Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada PT PLN Persero Distribusi Jawa Barat dan Banten terkesan berbelit. Namun hal ini dapat dimaklumi karena PT PLN merupakan lembaga BUMN yang terkait dan sangat dipengaruhi oleh sistem birokrasi. Kelemahan lain yaitu mengenai *deadline* pembayaran atas tagihan pada PT PLN. Sejauh ini penulis tidak mendapatkan data mengenai standar *deadline* pembayaran tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka peneliti memberi saran untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada pada PT PLN. Adapun saran perbaikan tersebut adalah seharusnya PT PLN Persero memiliki standar aplikasi pengeluaran kas yang menentukan berapa lama kas dapat dicairkan, sehingga perencanaan atas suatu tender dapat segera direalisasikan. Hal ini perlu diperhatikan guna untuk kepentingan pelanggan.